

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Separatisme di Papua merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Mereka menghendaki adanya pemisahan wilayah dari Indonesia. Konflik ini tidak hanya terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Papua, tetapi juga antara warga sipil, yang telah banyak memakan korban dikarenakan adanya aktivitas bersenjata dan penembakan bebas yang dilakukan anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka).<sup>1</sup>

*Melanesian Spearhead Group* (MSG) adalah pengelompokan subregional dari negara-negara populasi etnis Melanesia yang terletak di kawasan Pasifik Selatan yang mana negara-negara tersebut adalah Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan ditambah *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) atau New Caledonia yang dibentuk pada tahun 1988 namun resmi menjadi organisasi sub regional pada Maret 2007.<sup>2</sup> Indonesia merupakan *Associate Member* (AM) pada 20<sup>th</sup> *MSG Leader's Summit* di Honiara, Kepulauan Solomon, pada Juni 2015, yang sebelumnya sebagai *observer* pada 18<sup>th</sup> *MSG Leaders Summit* di Fiji, pada Maret 2011.<sup>3</sup> Isu separatisme Papua ini menjadi perhatian bagi negara-negara MSG yang menyebabkan adanya dukungan dan pengawasan terhadap Papua.

---

<sup>1</sup> ETAN, *West Papua Report June 2012*, 2012 diakses pada 8 November 2021, <http://etan.org/issues/wpapua/2012/1206wpap.htm>.

<sup>2</sup> Ronald May, *ANALYSIS The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity* (Australian, 2011):1.

<sup>3</sup> "Melanesian Spearhead Group (MSG)", Kemenlu republik Indonesia, diakses 24 November 2021, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman\\_list\\_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg](https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg)

Negara anggota MSG yang mendukung dan memberikan simpati atas kemerdekaan Papua adalah *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS), Vanuatu dan Kepulauan Solomon. Mereka melakukan pertemuan dengan aktivis dari Papua Merdeka, kemudian menyatakan dukungan mereka terhadap Papua yang disuarakan pada pertemuan MSG tahun 2013.<sup>4</sup> Kepentingan dari *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) tak beda jauh dari Vanuatu yang menginginkan kebebasan dari etnis Melanesia dan pelanggaran HAM yang terjadi pada Papua.<sup>5</sup> Kepulauan Solomon menyuarakan dukungan terhadap Papua dikarenakan pelanggaran HAM di Papua terhadap etnis Melanesia, yang menyebabkan adanya ketidaksenangan masyarakat etnis Melanesia tersebut terhadap pemerintah Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini yang menyebabkan adanya tuntutan dari masyarakat etnis Melanesia di MSG terhadap Indonesia mengenai separatisme di Papua.

MSG sendiri juga melakukan tindakan propaganda yang bisa dilihat dari adanya gugatan-gugatan mereka terhadap kebebasan Papua pada sidang PBB. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya ULMWP oleh Vanuatu, sebagai lembaga pembebasan dan mencari dukungan untuk masyarakat Papua. MSG dan negara-negara Pasifik lainnya, melakukan gugatan dalam sidang PBB, yang tercatat dimulai dari tahun 2016, kemudian dilanjutkan tahun 2017, 2018 dan 2019, mereka mengkritik Indonesia melakukan pelanggaran HAM dan bahkan

---

<sup>4</sup> “MSG to Send Mission to Jakarta and West Papua”, scoop world, diakses pada 24 November 2021, <https://www.scoop.co.nz/stories/WO1306/S00444/msg-to-send-mission-to-jakarta-and-west-papua.htm>

<sup>5</sup> “MSG to Send Mission to Jakarta and West Papua”, scoop world, diakses pada 24 November 2021, <https://www.scoop.co.nz/stories/WO1306/S00444/msg-to-send-mission-to-jakarta-and-west-papua.htm>

<sup>6</sup> “Indonesia accuses Pacific countries of interference”, RNZ Pacific Journalist, diakses pada 29 November 2021 <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/314234/indonesia-accuses-pacific-countries-of-interference>

mendesak PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan Papua Barat.<sup>7</sup> Gugatan terus berlanjut pada sidang umum PBB ke-75 tepatnya 27 September 2020, yang dimana mereka tetap membawa isu yang sama yaitu isu pelanggaran HAM.<sup>8</sup>

Gugatan dan dukungan yang dilakukan oleh negara-negara anggota MSG tersebut, membuat isu Papua sebagai isu yang penting dan diperhatikan oleh MSG, dibuktikan dengan dibentuknya ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*) pada tahun 2014 di Vanuatu, yang bertujuan untuk kemerdekaan dan kebebasan bagi warga Papua.<sup>9</sup> ULMWP sendiri menjadi *observer* di MSG pada tahun 2015, bersamaan dengan bergabungnya Indonesia dengan keanggotaan MSG. Dengan adanya ULMWP, negara-negara MSG yang mendukung kebebasan Papua menjadi semakin gigih dalam menyuarakan kebebasan Papua. ULMWP pada akhirnya tidak hanya akan mempermainkan hubungan diplomatik bilateral dari anggota individu ULMWP dengan Indonesia, tetapi nantinya dapat menjadi konflik di dalam kelompok. Konflik yang dimaksudkan adalah jika pemberatan dukungan berada di pihak Papua, maka akan ada perbedaan posisi antara Fiji, Papua Nugini dengan Vanuatu dan Kepulauan Solomon.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ali Fikri A, Helmi Shulfi A, and Rochmanna Dwi S, "Konstruksi Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com Terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua Dalam Sidang Umum PBB Ke-75)," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 9, no. 1 (2021): 29–38, 31

<sup>8</sup> CNN Indonesia 2021, diakses pada 8 November 2021 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200928075602-113-551633/vanuatu-negara-kecil-yang-dukung-kemerdekaan-papua>

<sup>9</sup> Muhammad Afif and Maulana Roziqi, "Diplomasi Soft Power Indonesia Dalam Melanesian Spearhead Group Terhadap United Liberation Movement for West Papua," *Journal of International Relations* 6, no. 2 (2020): 189–198, <http://www.fisip.undip.ac.id>. 190

<sup>10</sup> Greg Fry and Sandra Tarte, *The New Pacific Diplomacy*, ed. Greg Fry and Sandra Tarte, 2015 ANU P. (Australia: ANU Prss, 2009). 156

Adanya ULMWP disini untuk mencari dukungan dengan menyuarakan kebebasan dari Papua tersebut.<sup>11</sup> Upaya mencari dukungan dari ULMWP tersebut seperti kampanye yang diadakan di ruang siber untuk mendapatkan dukungan dari warganet di berbagai negara.<sup>12</sup> Tujuan dari ULMWP tersebut adalah untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dan dapat bergabung pada keanggotaan MSG. Semakin banyak keanggotaan dari ULMWP sendiri, semakin banyak dukungan untuk kemerdekaan Papua itu sendiri.

Dinamika isu separatisme Papua oleh MSG terlihat jelas dengan adanya suara dari representasi mereka di sidang umum PBB yang meminta dukungan dan penyelidikan terhadap kasus Papua. Contohnya dapat dilihat pada tahun 2016, pada sidang majelis umum PBB ke-71. Mereka menyuarakan dukungan dan juga meminta kepada negara yang hadir untuk juga memberikan dukungan dan suara terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pada Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-34 di Jenewa, Swiss, pada tahun 2017, Vanuatu menyuarakan sebagai perwakilan dari tujuh negara kepulauan di kawasan Pasifik, yang meminta PBB agar segera mendatangi daerah Papua dan melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, Indonesia melakukan berbagai respon diplomatik sebagai bentuk dari upaya Indonesia untuk menghentikan dinamika isu separatisme

---

<sup>11</sup> Drs Berlian Helmy and M Ec, “Mematahkan Dukungan Vanuatu Terhadap Gerakan ULMWP (United Liberalization Movement For West Papua) Guna Menegakkan Kedaulatan NKRI,” *JURNAL KAJIAN LEMHANAS RI* 18 (2019): 21–27.

<sup>12</sup> M. Yusuf Samad and Diah Ayu Permatasari, “Memahami Organisasi Free West Papua Campaign Melalui Kampanye Dukungan Terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Tergabung Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 4 (2021): 401–412. 403

<sup>13</sup> Ahmad Sabir, “Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua,” *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun XI XI, no. 1 (2018): 91–108.

tersebut dari negara-negara MSG terhadap kemerdekaan Papua. Diantaranya adalah dengan komunikasi strategis melalui Festival Budaya Melanesia di Kupang 2015, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional dan pemerintah terhadap masyarakat Melanesia, terutama di Indonesia.<sup>14</sup> Festival budaya Melanesia Kupang 2015 ini dihadiri oleh delegasi dari negara Melanesia yaitu Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, Timor Leste, New Caledonia dan Indonesia sendiri. Alasan kenapa budaya, dikarenakan kedua belah pihak juga memiliki kepentingan yang sama dalam mempromosikan budaya kepada dunia internasional, sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk upaya tepat yang dilakukan secara *soft power* yang tujuannya adalah untuk memberhentikan dukungan dari MSG terhadap Papua.<sup>15</sup> Sedangkan alasan kenapa Indonesia memilih melakukan diplomasi dalam respon mereka terhadap propaganda MSG sejalan dengan di inisiasinya Festival Budaya Melanesia Kupang 2015, yang dimana Anies Baswedan yang merupakan menteri pendidikan pada saat itu mengatakan bahwa diplomasi akan memiliki dampak yang berakhir dengan kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Sehingga sejalan dengan dibentuknya festival tersebut, Indonesia ingin menjalin kerjasama antara negara-negara MSG dan juga mengurangi adanya tindakan propaganda terkait isu Papua.

MSG terutama Vanuatu pada Sidang Dewan HAM PBB menuntut pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sedangkan mereka tidak membawa bukti yang cukup kuat tentang pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus

---

<sup>14</sup> Sabir, "Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua." 97

<sup>15</sup> Afif and Roziqi, "Diplomasi Soft Power Indonesia Dalam Melanesian Spearhead Group Terhadap United Liberation Movement for West Papua." *Journal of International Relations Volume 6, No 2 (2020): 189-198.* 191

tersebut.<sup>16</sup> Hal ini membuat Indonesia tidak perlu melakukan tindakan begitu besar dalam merespon gugatan tersebut. Oleh karena itu, berhubungan dengan tujuan dibentuknya Festival Budaya Melanesia Kupang 2015, Indonesia melakukan diplomasi untuk menjalin kerjasama sekaligus untuk memberhentikan dukungan dari propaganda MSG dengan alih-alih budaya dan etnis sebagai pemersatu dan penjalin persahabatan.

Festival Budaya Melanesia merupakan sebuah forum untuk masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap budaya Melanesia untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, tradisi dan budaya.<sup>17</sup> Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kacung Marijan. Festival Budaya Melanesia bertujuan untuk menimbulkan persahabatan antara Melanesia dan Indonesia, yang mana Indonesia melakukan kegiatan terhadap MSG dengan pendekatan diplomasi total, yang ditunjukkan dari kegiatan-kegiatan bantuan dan kerjasama.<sup>18</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan isu separatisme di Papua adalah salah satu isu domestik yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia. Isu separatisme ini kemudian juga mendapatkan respon negara-negara MSG, yang sebagian besar mendukung dari kemerdekaan Papua tersebut. Dukungan tersebut menjadi propaganda yang dilakukan oleh MSG yang terlihat dari adanya dukungan dan

---

<sup>16</sup> Siti Komariah, "Peran RI Dalam Menyikapi Vanuatu Pada Gerakan Separatisme Papua," *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6, no. 2 (2022): 153.

<sup>17</sup> "Festival Budaya Melanesia Dibuka", Kemendikbud Republik Indonesia (2015) diakses pada 24 November 2021 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/10/festival-budaya-melanesia-dibuka-4767-4767-4767>

<sup>18</sup> Felani Angela et al., "Diplomasi Pertahanan Indonesia Di Negara Kawasan Pasifik Selatan Terkait Internasionalisasi Separatisme Papua Guna Menjaga Keadaulatan Indonesia," *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5, no. 2 (2019): 87–106. *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5, no. 2 (2019): 87–106. 92

tuntutan yang terjadi. Pemerintah Indonesia melakukan respon diplomatik terhadap propaganda tersebut melalui berbagai macam program pemerintah kepada MSG untuk membentuk citra yang positif terhadap masyarakat Indonesia. Program ini digunakan sebagai alat diplomasi Indonesia untuk menanggulangi propaganda MSG ke Separatisme Papua. Hal ini menarik untuk dikaji bagaimana respon diplomatik Indonesia terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) terkait isu separatisme Papua tersebut.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana Diplomasi Budaya Indonesia terhadap MSG dalam dinamika isu separatisme Papua?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari pertanyaan penelitian yang diutarakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana respon diplomatik Indonesia terhadap negara-negara MSG dalam menanggulangi propaganda mereka terhadap gerakan separatis di Papua.
- b. Menghasilkan analisis mengenai diplomasi budaya Indonesia terhadap MSG terkait adanya dukungan MSG terhadap gerakan separatis di Papua.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya: secara teoritis penelitian ini dapat membantu penulis dan pembaca dalam memahami bagaimana Diplomasi Budaya Indonesia terhadap *Melanesian Spearhead Group* (MSG) terkait dinamika isu Separatisme Papua. Secara praktis,

penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan dan dapat membantu pembaca memahami isu yang penulis angkat dalam tulisan ini.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam membuat penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dirasa berhubungan dengan penelitian. Studi terdahulu yang diambil oleh penulis adalah pertama, tulisan dari Stephanie Lawson yang berjudul *West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics*. Dalam tulisannya Lawson menjelaskan bahwa identitas Melanesia telah di konsolidasikan selama tiga dekade terakhir melalui sub regional di kawasan pasifik Barat Daya, yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Solidaritas kelompok ini telah tegang dikarenakan berbagai masalah dari waktu ke waktu, tetapi tidak seberat penduduk Indonesia dengan yang dikenal sebagai masalah Papua Barat, yang penduduk aslinya adalah etnis Melanesia.<sup>19</sup>

Dalam tulisannya Stephanie Lawson juga menjelaskan bahwa ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*) merupakan sebuah petisi dari anggota MSG, sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan Papua. Hal ini menjadi tantangan untuk Indonesia dikarenakan posisi Indonesia yang bertumpu pada klaim standar hukum internasional tentang hak untuk non-intervensi dalam urusan internal negara. Reaksi dari keputusan MSG terhadap Indonesia dan Papua Barat telah bercampur-campur, dengan beberapa melihat aksi dari MSG sebagai aksi jual ke Indonesia, sementara yang lainnya melihat sebagai langkah yang positif dalam mendapatkan beberapa bentuk pengakuan internasional untuk orang

---

<sup>19</sup> Stephanie Lawson, "West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: Competing Logics in Regional and International Politics," *Australian Journal of International Affairs* 70, no. 5 (September 2, 2016): 506–524. 507

Papua Barat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya dua bentuk perilaku dari MSG ke Indonesia. Yang pertama adalah dukungan dari beberapa negara seperti Vanuatu, Solomon dan FLNKS, dan juga ada bentuk dukungan terhadap Indonesia, yaitu Fiji dan Papua Nugini.

Perbandingan dengan penelitian penulis adalah, penulis lebih mengkaji kepada diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk merespon keterlibatan MSG tersebut, sedangkan tulisan dari Lawson lebih memfokuskan kepada reaksi dari MSG dan keputusan-keputusan mereka terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Selain itu, perbedaan juga terlihat dimana penulis membahas mengenai fokus analisis dari kegiatan diplomasi Indonesia, sedangkan Lawson lebih berfokus membahas mengenai tindakan MSG terhadap isu Papua dan hasil yang mereka kembangkan.

Studi pustaka kedua yang penulis gunakan adalah tulisan dari Gia Noor Syah Putra, Tri Legionosuko, dan Adnan Madjid, yang berjudul *Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu*. Tulisan dari Gia dkk ini membicarakan tentang bagaimana upaya atau strategi Indonesia untuk melakukan propaganda atas propaganda yang dilakukan oleh OPM, dengan melakukan pendekatan dan hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota MSG (*Melanesian Spearhead Group*). Gia dkk, menuliskan bahwa upaya pemerintah Indonesia terhadap negara-negara anggota MSG, dilakukan dengan pendekatan diplomasi secara total, terutama kepada Vanuatu, dikarenakan mereka yang sangat

keras dalam mendukung kemerdekaan Papua<sup>20</sup>. Gia dkk menjelaskan bahwa tujuan dari Indonesia pertama kali melakukan diplomasi kepada negara-negara MSG adalah dikarenakan Papua mendapatkan dukungan atas propaganda mereka dari negara-negara OPM,<sup>21</sup>. Hal ini menjelaskan bahwa dengan melakukan pendekatan terhadap negara-negara MSG akan mengurangi upaya dari OPM sendiri dalam melakukan propaganda mereka serta secara jelas akan memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota MSG.

Penulis menggunakan studi pustaka dari Gia dkk sebagai perbandingan terhadap diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap MSG. Penulis mengkaji diplomasi budayanya yang dimana dilakukan karena adanya propaganda yang dilakukan oleh MSG. Sedangkan dari tulisan Gia dkk, propaganda dilakukan oleh OPM untuk mendapatkan perhatian dari MSG.

Studi pustaka ketiga yang penulis gunakan adalah tulisan dari Baiq Wardhani dan Visensio Dugis yang berjudul *Interpreting Indonesia's "Look East" Policy: The Security Dimension of Foreign Aid*. Tulisan dari Baiq dan Visensio ini menjelaskan mengenai peran pemerintah yang secara aktif mempromosikan kerjasama antar negara berkembang dengan memainkan peran penting sebagai pemberi *non-DAC (Development Assistance Committee)* yang dimana fokus dari tulisannya merupakan negara di kawasan Pasifik. Negara-negara di kawasan pasifik tersebut telah mendapatkan bantuan dari Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan sebagian dari mereka juga telah memberikan bantuan luar negara-negara berkembang lainnya di kawasan Pasifik.

---

<sup>20</sup> Gia Noor et al., "Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu," *Jurnal Peperangan Asimetris* 5, no. 2 (2019): 31–44.

<sup>21</sup> Syah Putra G.N, Legionosuke T, Madjid A, (2019): 38-39

Menjadi perhatian bagi Baiq dan Visensio pada tulisan mereka adalah, hubungan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut dalam menghadapi pertentangan yang dianggap sebagai tantangan besar. Tantangan besar tersebut adalah keputusan negara-negara kawasan pasifik tersebut terkait kemerdekaan Papua. Hal ini dijelaskan oleh Baiq dan Visensio dimana Indonesia telah melakukan hubungan dengan negara kawasan Pasifik dengan pemberian bantuan. Pendekatan yang dilakukan Indonesia ditujukan untuk menyelesaikan masalah domestic terkait dengan integrasi nasional, dan keutuhan wilayah dibagian Timur, khususnya dengan isu kemerdekaan Papua.<sup>22</sup>

Perbandingan dengan tulisan dari penulis, penulis menggunakan tulisan dari Baiq dan Visensio sebagai perbandingan melihat keputusan yang diambil Indonesia dalam kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara kawasan pasifik dengan memberikan bantuan-bantuan dan juga hubungan diplomatik. Sedangkan penulis lebih berfokus membahas mengenai diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap MSG.

Studi pustaka keempat yang penulis gunakan adalah tulisan dari V.O Wati, S.R Apresian, dan Elisabeth A. Satya Dewi yang berjudul *The Collaboration Between Indonesia and Pacific Island Countries in Facing Environmental Challenges*. Dalam tulisan ini Wati dkk menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan yang masih menjadi isu utama bagi negara-negara di Kepulauan Pasifik.<sup>23</sup> Mereka menambahkan bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang

---

<sup>22</sup> Baiq Wardhani and Vinsensio Dugis, "Interpreting Indonesia's 'Look East' Policy: The Security Dimension of Foreign Aid," *Issues and Studies* 56, no. 3 (September 1, 2020).

<sup>23</sup> Vrameswari Omega Wati, Stanislaus Risadi Apresian, and Elisabeth A Satya Dewi, "The Collaboration Between Indonesia and Pacific Island Countries in Facing Environmental

seringkali terkena dampak dari perubahan iklim dari dunia. Contohnya dapat dilihat dari beberapa pulau di Samudra Pasifik, seperti Nahlap, Laiap, dan Nahtik di Micronesia telah tenggelam. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, juga bisa mendapatkan ancaman yang serupa.

Adanya ancaman yang sama dari Indonesia dan negara-negara di kepulauan pasifik tersebut, membuat pembangunan kerjasama untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini menjadi hal cukup penting. Indonesia memberikan bantuan kepada negara-negara kepulauan Pasifik melalui *South-south Cooperation Framework (SSC)*.<sup>24</sup> Dengan SSC, sudah ada beberapa beberapa bantuan yang diberikan, diantaranya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui beberapa pelatihan. Pada tahun 2014-2017, Indonesia juga sudah mengirimkan 41 pelatihan yang sudah di persiapkan untuk Fiji yang merupakan rangka kerjasama teknis.

Perbedaan tulisan penulis dengan tulisan V.O Wati dkk adalah, tulisan penulis lebih membahas kepada hubungan diplomatik yang dilihat dari diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap MSG, sedangkan tulisan V.O Wati dkk, lebih membahas kepada hubungan kerjasama atas permasalahan lingkungan dan bencana alam yang terjadi di antara Indonesia dan negara-negara kepulauan Pasifik.

Studi pustaka kelima yang penulis gunakan adalah tulisan dari Bimbi Rianda, Yuswari O Djemat, dan Angga Nurdin Rahmat yang berjudul *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016*. Dalam tulisan ini, Rianda dkk menekankan

---

Challenges,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14, no. 1 (2018), <http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/buil>. 138

<sup>24</sup> Vrameswari Pmega Wati dkk, (2018). 139

tentang beberapa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap dukungan Republik Vanuatu kepada kemerdekaan Papua Barat berdasarkan tindakan dari Vanuatu tersebut.<sup>25</sup> Dalam menjaga hubungan baik dengan Republik Vanuatu, Indonesia tetap memberikan sikap yang *Low Profile* dengan menjalin hubungan kerjasama dan berbagai bantuan guna untuk tetap menjaga citra positif. Tetapi dilihat dari kenyataannya, sikap yang dikembalikan oleh Vanuatu tidak seperti yang diharapkan oleh Indonesia, dengan tidak mendapatkan respon yang positif. Terlihat dari bagaimana Vanuatu tetap memberikan dukungan terhadap gerakan Separatisme di Papua.<sup>26</sup>

Dalam tulisannya, Riandi dkk menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan dua kebijakan luar negeri, pertama adalah kebijakan luar negeri yang dilihat dari aspek strategi diplomasi dengan menyamakan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan kegiatan internasional yang dirasa lebih efektif dan bekerja dibandingkan dengan kunjungan langsung ke negara Vanuatu. Kebijakan luar negeri yang kedua ditinjau dari aspek perilaku dan aksi dari Indonesia, yaitu seperti memandang negara Vanuatu sebagai negara sahabat sesama ras; memberikan bantuan kemanusiaan; memberikan bantuan kerjasama kepolisian; dan menggunakan strategi *people to people contact*.<sup>27</sup>

Perbedaan dengan tulisan dari Bimbi Rianda dkk dengan tulisan penulis adalah dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh Indonesia. Disini Indonesia lebih berfokus kepada Vanuatu yang menjalin hubungan mereka dengan kerjasama-

---

<sup>25</sup> Bimbi Rianda, Yuswara O Djemat, and Angga Nurdin Rahmat, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016," *Dinamika Global* 02, no. 01 (2017): 82-113. 83

<sup>26</sup> Bimbi Rianda, Djemat, and Rahmat, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016." 85

<sup>27</sup> Bimbi Rianda, Yuswara O Djemat, and Angga Nurdin Rahmat, (2017). 99

kerjasama internasional, dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh Indonesia sebagai upaya dari Indonesia dalam memberhentikan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua. Tulisan penulis juga membahas mengenai upaya Indonesia dalam memberhentikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua, tetapi dengan konteks yang lebih besar, yaitu MSG. Upaya tersebut dapat dilihat dari kerjasama budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan diplomasi budaya.

## 1.7 Kerangka Pemikiran

### 1.7.1 Cultural Diplomacy

Dalam menjelaskan respon diplomatik Indonesia terhadap negara-negara MSG, maka penulis menggunakan sebuah konsep *Cultural Diplomacy*, yang merupakan *State initiation*. Konsep Cultural diplomacy ini diambil dari seorang ahli yang bernama Erik Pajtinka dalam tulisannya yang berjudul *Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations*. Erik menjelaskan bahwa diplomasi budaya secara umum merupakan turunan dari diplomasi publik, yang meliputi seluruh rangkaian kegiatan lain yang berkaitan dengan memajukan kepentingan negara di luar negeri.<sup>28</sup>

*Cultural Diplomacy* dijelaskan sebagai “praktik budaya sebagai mekanisme untuk mempromosikan kepentingan aktor, yang dapat mencakup berbagai hal secara internasional, seperti tur internasional dan lainnya”. Hubungan budaya secara non-tradisional disini lain mengacu kepada kontak lintas batas dan interaksi yang terjadi diluar dari keterlibatan negara manapun. Interaksi tersebut - melibatkan pariwisata, pendidikan keluar negeri, artefak budaya, sirkulasi buku

---

<sup>28</sup> Erik Pajtinka, “Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International,” *POLITICKÉ VEDY* 17, no. 4 (2014): 95–108. 101

dan media, migrasi dan pernikahan campuran, transfer ide melalui berbagai media – “tumbuh secara alami dan organik”.

Dalam konteks diplomasi budaya, bagaimanapun, budaya harus dianggap dalam arti yang lebih luas sebagai “kumpulan ciri-ciri spiritual, material, intelektual dan emosional masyarakat atau kelompok sosial, yang mencakup tidak hanya seni dan sastra, tetapi juga gaya dan cara hidup, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan”. Hal ini mematahkan pengertian singkat dari diplomasi kebudayaan yang hanya dihubungkan dengan seni, sastra, dan komponen budaya yang terlihat lainnya.

Pajtinka menjelaskan beberapa bagian penting dari kegiatan diplomasi kebudayaan, yang dapat dilakukan dalam untuk menunjang keberhasilan diplomasi kebudayaan, bagian-bagian tersebut adalah:<sup>29</sup>

1. *Assisting cultural subjects in the dissemination of national culture and culture identity.*

Dalam hal ini negara dalam kegiatan diplomasi kebudayaan harus menyampaikan pesan dari *national culture* dan *cultural identity*, yang disampaikan mungkin dalam bentuk promosi, organisasi dan lembaga kebudayaan, LSM terkait, atlet olahraga dan lainnya yang memang berasal dari negara. Kerangka diplomasi kebudayaan ini tergantung kepada negara penerima yang diberi diplomasi tersebut, serta pada kebutuhan individu dari subjek budaya yang bersangkutan.

2. *Promoting dissemination of the national language of the sending state in the receiving state*

---

<sup>29</sup> Pajtinka, “Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International.” 103-106

Kegiatan ini dapat mencakup membantu lembaga pendidikan atau akademik lokal dari negara penerima dalam memberikan pelatihan bahasa dan membantu memastikan guru bahasa dan/atau sebagai mengajar sastra di negara penerima. Hal ini juga termasuk membantu perpustakaan di negara penerima menyediakan buku dan karya lain yang menggunakan bahasa nasional dari negara pengirim, serta adanya pertukaran pendapat dan budaya dengan melakukan diskusi dengan penulis dari negara pengirim.

3. *Promoting and explaining cultural values of the sending state in the receiving state.*

Dalam menjalankan bagian ini, dibutuhkan seorang diplomat dari negara pengirim yang bisa bergabung dalam sebuah debat publik, pengisi kuliah umum, seminar atau hal lain yang serupa, yang pertanyaannya dan isu yang dibahas adalah masalah budaya. Hal ini menjadi kesempatan untuk diplomat dalam event internasional tersebut, bukan hanya untuk mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang berbeda dari negara tujuan, tetapi juga menjelaskan beberapa aspek budaya negara kepada negara tujuan.

4. *Promotion of cooperation among cultural subjects from the sending and the receiving state*

Promosi kerjasama ini sebagian besar dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada subyek budaya di satu negara (pengirim) tentang kemungkinan menjalin kontak dan kerjasama dengan subyek budaya di negara kedua (penerima) dan sebaliknya.

5. *Supporting and keeping up of contacts with expatriate communities in the receiving state.*

Biasanya kegiatan ini dapat mencakup pengorganisasian acara budaya untuk anggota komunitas ekspatriat (seringkali pada kesempatan peringatan nasional) atau menghadiri acara yang diadakan oleh organisasi tersebut atau mengunjungi asosiasi dan fasilitas budaya di negara penerima. Hal ini bisa saja dengan adanya setidaknya beberapa tahun sekali terciptanya sebuah kegiatan budaya yang memfasilitasi komunitas expatriat tersebut. Kegiatan tersebut merupakan program dari negara ataupun organisasi budaya yang memang khusus untuk memberikan fasilitas budaya.

Tujuan perjanjian politik, ekonomi, militer dan juga tujuan kerjasama ini membuat para pembuat kebijakan di negara harus melakukan suatu inisiasi yang dimana tindakan tersebut yang bisa dikatakan dengan *state initiation*.<sup>30</sup> *State initiation* dalam diplomasi kebudayaan dimaksudkan dengan tindakan dari negara melakukan inisiasi program diplomasi kebudayaan, dimana program diplomasi kebudayaan tersebut dianggap sebagai *state initiation* tersebut. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, dimana salah satunya adalah dikarenakan adanya tindakan dari negara lain yang menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan suatu negara lain, ataupun diplomasi budaya muncul pada saat krisis.<sup>31</sup>

Salah satu bentuk dari *state initiation* adalah China yang menggunakan project CI (Confucius Institute) sebagai sebuah platform untuk diplomasi kebudayaan, yang dilihat sebagai upaya untuk melawan krisis eksternal yang

---

<sup>30</sup> Pajtinka, "Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International." 103

<sup>31</sup> Jan Melissen, *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2005). 17

muncul dari “teori ancaman China”. CI melakukan beberapa program seperti pengenalan budaya-budaya China sendiri, dan juga beasiswa-beasiswa budaya.<sup>32</sup>

Tindakan dari Indonesia yang mengadakan festival budaya Melanesia dan BSBI (Beasiswa Seni Budaya Indonesia) bisa dikatakan sebagai bentuk dari *state initiation* dikarenakan program ini memang berasal dari pemerintah, yang terbukti merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Festival budaya tersebut dijadikan sebagai bentuk diplomasi kebudayaan Indonesia yang dimana tujuan Indonesia mengadakan festival tersebut dikarenakan adanya dukungan dari negara-negara MSG terhadap kemerdekaan Papua. *State Initiation* disini terlihat tujuannya memang untuk pertukaran budaya, dan menjalin persahabatan antara etnis Melanesia di Indonesia dan negara-negara MSG.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian ini sangat mementingkan proses, peristiwa dan orientasi<sup>33</sup>. Dalam penelitian kualitatif sering melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit, sehingga hal yang biasa dilakukan adalah bergelut dengan berbagai analisis tematik.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Penelitian dengan model deskriptif-analisis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam.

---

<sup>32</sup> Su-yan Pan, “Confucius Institute Project: China ’ s Cultural Diplomacy and Soft Power Projection,” *Asian Education and Development Studies* 2, no. 1 (2013): 22–33. 24-25

<sup>33</sup> Somantri Rusliwa G, *Memahami Metode Kualitatif*. Depok: FISIP Universitas Indonesia, 2005

Penelitian ini berguna untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah ataupun sedang terjadi dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **1.8.2 Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi penulis agar tidak meluas dan keluar dari apa yang dimaksud. Penulis membatasi penelitian dimulai pada Festival Budaya Melanesia tahun 2015 di Kupang yang diinisiasi oleh Indonesia sampai pada Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia pada tahun 2022, yang dilihat sebagai diplomasi budaya Indonesia kepada negara-negara MSG. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui program-program pemerintah tersebut. Selain itu pihak yang termasuk dalam penelitian hanya akan terbatas antara Indonesia dan negara-negara MSG. Pihak dari Indonesia dan negara-negara MSG ini bisa mencakup masyarakat atau publik, maupun pihak-pihak lain yang mungkin non-pemerintahan yang bergabung dalam program-program tersebut.

### **1.8.3 Unit Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen merupakan objek yang perilakunya dianalisis dan diteliti. Oleh sebab itu yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Diplomasi Budaya Indonesia melalui program-program pemerintah. Kemudian, unit eksplanasi atau variabel independen adalah unit yang mempengaruhi sikap atau perilaku dari unit analisis. Dengan demikian yang

menjadi unit eksplanasi dari penelitian ini adalah keterlibatan negara-negara anggota MSG terkait dinamika isu separatisme Papua.

#### **1.8.4 Tingkat Analisis**

Tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi para aktor yang menjadi objek kajian berinteraksi dalam masalah penelitian. Pada penelitian ini tingkat analisis berada pada level kawasan atau regional yaitu negara-negara MSG, yang levelnya pada pemerintah dan publik. Hal tersebut dijadikan sebagai tingkat analisis dikarenakan penulis akan menjelaskan bagaimana upaya dari pemerintah Indonesia melakukan diplomasi kepada negara-negara MSG. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah negara Indonesia dan negara-negara di MSG.

#### **1.8.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan fakta dan data-data tertulis dari berbagai sumber, sehingga bersifat sekunder atau tidak langsung, yang dimana tidak memerlukan riset lapangan. Pelaksanaannya, penelitian ini mengumpulkan data-data pustaka yang didapat dari artikel, jurnal, buku, website yang berhubungan dengan *Melanesian Spearhead Group*, Diplomasi Budaya Indonesia, Festival Budaya Melanesia, MACFEST, BSBI, dan *Cultural Diplomacy* kemudian baru diolah menjadi dokumen yang bersumber dari data-data tersebut. Data-data Data yang penulis gunakan adalah data-data yang berkaitan dengan dukungan negara-negara MSG terhadap kemerdekaan Papua, serta diplomasi Indonesia terhadap negara-negara MSG sebagai bentuk

respon Indonesia untuk menghentikan negara-negara MSG mendukung separatisme Papua.

Data mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara MSG penulis temukan di *Buku Diplomasi Publik Indonesia 2014*, yang didapatkan dari website Kementerian Luar Negeri Indonesia (<https://kemlu.go.id>) dan beberapa laporan terkait yang juga berasal dari website Kemenlu. Kemudian data-data lain yang berhubungan dengan festival budaya Melanesia, didapatkan melalui website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) dan beberapa laporan yang didapatkan melalui artikel-artikel dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan, serta website-website berita yang berkaitan dengan Festival budaya Melanesia dan juga dukungan negara-negara MSG terhadap separatisme Papua.

#### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan berhubungan dengan pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat kualitatif, yang dimana data yang digunakan bukan berbentuk angka atau numeric melainkan berbentuk analisis data yang dikumpulkan melalui data-data yang relevan yang telah diseleksi sesuai kelompok permasalahan dan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Analisis data kualitatif adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menjelaskan 3 tahapan dalam menganalisis data:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mathew B Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, SAGE PUBLICATION, 1994.

## 1. Reduksi Data

Pada tahapan ini penulis akan mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian kemudian mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan ke dalam beberapa kategori. Pengelompokan yang dilakukan berdasarkan pada kategori isu separatisme Papua, respon dari negara-negara MSG, serta diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia terkait adanya propaganda MSG terhadap isu separatisme Papua. Data yang penulis kumpulkan sesuai dengan batasan penelitian yaitu pada tahun 2015-2022. Setelah pengelompokan tersebut dilaksanakan, penulis akan membaca dokumen-dokumen tersebut secara berurutan berdasarkan kategori yang telah penulis siapkan sebelumnya.

## 2. Penyajian data

Setelah membaca dokumen yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, penulis akan mengambil data penting dari bahan bacaan tersebut kemudian melakukan analisis terhadap bahan bacaan yang telah dikumpulkan. Untuk memulai penelitian ini, pertama sekali penulis menganalisis mengenai isu separatisme yang terjadi di Papua. Hal ini termasuk sejarahnya, penyebabnya dan lain sebagainya. Kemudian penulis menganalisis mengenai respon dari negara-negara MSG dalam dinamika isu separatisme Papua, kemudian bagaimana respon Indonesia dalam menanggapi propaganda tersebut. Dari hal tersebut, penulis akan menganalisis respon Indonesia yang bentuknya dalam diplomasi budaya terhadap MSG terkait propaganda yang mereka lakukan dalam isu separatisme Papua.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah proses penyajian data yang berupa hasil analisis penulis dan dari pengaplikasian konsep penelitian, penulis akan menyimpulkan dan melakukan verifikasi terhadap penelitian tersebut guna memastikan bahwa kerangka konsep yang digunakan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Verifikasi data ini penulis sampaikan pada bab 2, 3 dan 4 yang mana pada bab 4 penulis menjelaskan data disertakan dengan konsep yang di jelaskan sebelumnya.

#### 1.9 Sistematika Penulisan

##### **BAB I       Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (pendekatan penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), serta termasuk sistematika penulisan.

##### **BAB II       *Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam Dinamika Isu Separatisme Papua***

Dalam bab ini dijelaskan mengenai isu separatisme Papua kemudian respon dari MSG terkait isu tersebut Pada bab ini akan diperjelaskan bagaimana respon-respon dari MSG tersebut, termasuk isu-isu yang dilakukan, seperti propaganda dan dukungan-dukungan.

### **BAB III      Diplomasi Budaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap MSG**

Pada bab ini, dijelaskan mengenai apa-apa saja Diplomasi Budaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam Merespon keterlibatan MSG dalam dinamika isu separatisme Papua.

### **BAB IV      Analisis Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara-Negara MSG**

Dalam bab ini akan dianalisis Diplomasi Budaya Indonesia terhadap negara-negara MSG berdasarkan pemikiran Erik Pajtinka yang fokusnya untuk membahas bagaimana strategi diplomasi Indonesia terhadap negara-negara MSG dalam merespon keterlibatan mereka dalam dinamika isu separatisme Papua.

### **BAB V      Penutup**

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan akhir yang juga mencakup hasil dari penelitian yang sudah dibahas di bab sebelumnya mengenai respon diplomatik Indonesia terhadap negara-negara MSG terkait adanya propaganda separatisme Papua.